



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1767, 2020

BKPM. Sistem Klasifikasi Keamanan. Akses Arsip Dinamis.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

- tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Arsip BKPM adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
4. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan

informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

5. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
6. Pusat Berkas/*Central File* adalah pusat berkas atau pusat penyimpanan arsip aktif.
7. Pusat Arsip/*Records Center* adalah pusat arsip atau pusat penyimpanan arsip inaktif.
8. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM dimaksudkan untuk:
 - a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM bertujuan untuk:
- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis BKPM;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis dengan prinsip cepat, tepat, dan aman;
 - c. tersedianya informasi BKPM yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis; dan
 - d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan;

Pasal 3

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, dan Rahasia;
- b. Pengamanan Arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi Terbatas, dan Rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan Akses Arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

Pasal 4

- (1) Hak akses diberikan kepada pengguna internal dan pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.

2. pimpinan tingkat tinggi yaitu satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tertinggi, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
 3. pimpinan tingkat menengah yaitu satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tinggi, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - b. pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas dan rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam

rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 5

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM diatur sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta BKPM dapat diklasifikasikan menjadi informasi sebagai berikut:
 1. Biasa/Terbuka;
 2. Terbatas; dan
 3. Rahasia.
- b. klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi tingkat pengamanannya;
- c. klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pengaturan aksesnya;

Pasal 6

- (1) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis BKPM menggunakan sarana perangkat keras/*hardware* dan perangkat lunak/*software*.
- (2) Perangkat keras/*hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak arsip/*filing cabinet* untuk menyimpan arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip Rahasia dan Sangat Rahasia;

- b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak/*software* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 7

- (1) Pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas;
- (2) Pejabat fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 8

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi pejabat fungsional Arsiparis di bagian Arsip dan pengelola arsip aktif di Pusat Berkas/*Central File* BKPM.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam Pengamanan Arsip di Pusat Arsip/*Records Center* dalam menetapkan hak Akses Arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau pengelola arsip aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di Pusat Berkas/*Central File*.

Pasal 9

Arsip Dinamis BKPM terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yang meliputi:

- a. Biasa/Terbuka;
- b. Terbatas; dan
- c. Rahasia.

Pasal 10

Arsip Dinamis BKPM yang termasuk kategori arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja BKPM.

Pasal 11

Arsip Dinamis BKPM yang termasuk kategori arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis BKPM.

Pasal 12

Arsip Dinamis BKPM yang termasuk kategori arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mengandung dampak yang luas sehingga mengganggu kinerja BKPM.

Pasal 13

- (1) Pengamanan Arsip pada ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan Arsip kategori Biasa/Terbuka disimpan pada rak besi, arsip kategori Terbatas di simpan pada rak arsip/*filing cabinet*, dan arsip kategori Rahasia di simpan pada lemari besi.

Pasal 14

- (1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis BKPM meliputi Penciptaan daftar arsip Terbatas dan daftar arsip Rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di Pusat Arsip/*Records Center* dan Pusat Berkas/*Central File*.

Pasal 15

Tabel Klasifikasi Keamanan dan pengamanan akses Arsip Dinamis BKPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENGAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
I.	RN	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL					
1.	RN.01	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPM - Dokumen Renstra	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
2.	RN.02	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) BKPM - Rencana Umum Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
3.	RN.03	Pembuatan Peta Penanaman Modal Indonesia - Peta Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
4.	RN.04	Kajian Rencana Pengembangan Industri Berbasis Agribisnis					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	04.01	Industri Berbasis Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
	04.02	Industri Berbasis Kelautan, Perikanan dan Peternakan - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
5.	RN.05	Kajian Rencana Pengembangan Industri Berbasis Energi	Biasa/Terbuka				
	05.01	Industri Berbasis Energi Terbarukan - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
	05.02	Industri Berbasis Energi Tak Terbarukan - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
6.	RN.06	Kajian Rencana Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Mineral					
	06.01	Industri Berbasis Sumber Daya Mineral Logam - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
	06.02	Industri Berbasis Sumber Daya Mineral Non Logam - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
7.	RN.07	Kajian Rencana Pengembangan Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	07.01	Industri Logam dan Mesin - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
	07.02	Industri Tekstil dan Aneka - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
8.	RN.08	Kajian Rencana Pengembangan Industri Kimia					
	08.01	Industri Kimia Dasar - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
	08.02	Industri Barang Kimia dan Farmasi - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
9.	RN.09	Kajian Rencana Pengembangan Industri Alat Transportasi dan Telematika					
	09.01	Industri Alat Transportasi - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
	09.02	Industri Telematika - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
10.	RN.10	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa Perdagangan dan Pariwisata					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	10.01	Jasa Perdagangan - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
	10.02	Jasa Pariwisata termasuk Jasa Kebudayaan - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
11.	RN.11	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya					
	11.01	Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
	11.02	Jasa Lainnya - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
12.	RN.12	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Kawasan Ekonomi					
	12.01	Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
	12.02	Kawasan Ekonomi Lainnya - Korespondensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
13.		- Laporan Hasil Kajian			kewenangan), Pengawas Internal	Eksternal dan Penegak Hukum	Kawasan
	RN.13	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan					
	13.01	Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
	13.02	Infrastruktur Jalan dan Jembatan - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
14.	RN.14	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air					
	14.01	Infrastruktur Energi - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
	14.02	Infrastruktur Sumber Daya Air - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
15.	RN.15	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya					
	15.01	Infrastruktur Transportasi Laut - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Direktorat Perencanaan Infrastruktur

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	15.02	Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya - Korespondensi - Laporan Hasil Kajian	Biasa/Terbuka	Internal Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Penegak Hukum Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
16.	RN.16	Fasilitasi Perizinan dan Non Perizinan serta Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga					
	16.01	Penyusunan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) - Korespondensi - Laporan Kegiatan/Rekomendasi Kerja Sama	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
	16.02	Penyusunan Non Skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta/Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) - Korespondensi - Laporan Kegiatan/Rekomendasi Kerja Sama	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
17.	RN.17	Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus - Korespondensi - Laporan Kegiatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
18.	RN.18	Fasilitasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi - Korespondensi - Laporan Kegiatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
19.	RN.19	Pengemasan Pemasaran (<i>Market Sounding</i>) dan Dialog Kebijakan (<i>Policy Dialogue</i>) - Korespondensi - Laporan Kegiatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
II.	KI	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rahasia				
1.	KI.01	Analisis Kebijakan Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan Hasil Analisis - Draft Kebijakan		Pejabat Eselon I (Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kebijakan bidang usaha yang menjadi kewenangan/kementerian/ lembaga	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
2.	KI.02	Analisis dan Penyusunan Sistem Insentif Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan Analisis - Draft Peraturan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
3.	KI.03	Koordinasi Perbaikan Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) - Laporan - Korespondensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
4.	KI.04	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Usaha Penanaman Modal -Laporan -Korespondensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
5.	KI.05	Analisis dan Penyusunan Administrasi Penanaman Modal - <i>Letter of Intent</i> - Konfirmasi Kegiatan Usaha - Konfirmasi Bidang Usaha - Konfirmasi Fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) - Konfirmasi KBLI	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perusahaan	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
6.	KI.06	Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Daerah					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	06.01	Pelaksanaan Pemetaan Potensi dan Peluang Potensi Daerah - Korespondensi - Peta Potensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
	06.02	Focus Group Discussion (FGD) Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
	06.03	Workshop Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Daerah - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
7.	KI.07	Pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data potensi investasi daerah	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
8.	KI.08	Pembinaan dan Penyuluhan melalui Workshop Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pemberdayaan Usaha
9.	KI.09	Kegiatan Kemitraan Usaha (<i>Matchmaking</i>) - Korespondensi - Laporan - Perjanjian Kerja Sama	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pemberdayaan Usaha
10.	KI.10	Perkuatan Data Realisasi PMA/PMDN yang Wajib Bermitra dengan UKM - Korespondensi - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perusahaan	Direktorat Pemberdayaan Usaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
11.	KI.11	Pelayanan Dunia Usaha	Biasa/Terbuka				
	11.01	Asosiasi Dunia Usaha Nasional - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pemberdayaan Usaha
	11.02	Pemberdayaan Pelaku Usaha Berbasis Teknologi - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pemberdayaan Usaha
III.	PM	PROMOSI PENANAMAN MODAL					
I.	PM.01	Pengembangan Promosi					
	01.01	Analisis Target Promosi - Korespondensi - Laporan hasil kajian dan pemantauan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pengembangan Promosi
	01.02	Analisis Daya Saing Promosi - Korespondensi - Laporan hasil kajian dan pemantauan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pengembangan Promosi
	01.03	Fasilitasi Promosi Luar Negeri Wilayah Amerika dan Eropa - Korespondensi - Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pengembangan Promosi
	01.04	Fasilitasi Promosi Luar Negeri Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika - Korespondensi - Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pengembangan Promosi
	01.05	Kajian Efektivitas IIPC - Korespondensi - Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pengembangan Promosi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
2.	PM.02 02.01	Promosi Sektoral	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Promosi Sektoral
		Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan					
		- Korespondensi - Materi Promosi - Laporan					
	02.02	Promosi Industri Manufaktur	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Promosi Sektoral
		- Korespondensi - Materi Promosi - Laporan					
		Promosi Infrastruktur					
	02.03	- Korespondensi - Materi Promosi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Promosi Sektoral
		Promosi Infrastruktur					
		- Korespondensi - Materi Promosi - Laporan					
3.	PM.03 03.01	Fasilitasi Promosi Daerah	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah
		Wilayah Sumatera dan Kalimantan					
		- Korespondensi - Materi Promosi - Laporan					
	03.02	Wilayah Jawa dan Bali	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah
		- Korespondensi - Materi Promosi - Laporan					
		Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua					
	03.03	- Korespondensi - Materi Promosi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah
		Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua					
		- Korespondensi - Materi Promosi - Laporan					
4.	PM.04 04.01	Pameran dan Sarana Promosi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Pameran dan Sarana Promosi
		Penyusunan Program dan Monitoring Pameran - Program Kerja					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Laporan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pameran dan Sarana Promosi - Laporan	Biasa/Terbuka	Internal Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Penegak Hukum Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Direktorat Pameran dan Sarana Promosi
	04.03	Materi Promosi Media Cetak - Buku Investment Guide - Brosur-brosur/Leaflet - Majalah - Buku FAQ	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Direktorat Pameran dan Sarana Promosi
	04.04	Publikasi dan Distribusi - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Direktorat Pameran dan Sarana Promosi
	04.05	Materi Promosi Media Elektronik - Film/Video - CD/Hard Disk - Multimedia/Situs Web	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Direktorat Pameran dan Sarana Promosi
	04.06	Pelayanan Informasi - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Direktorat Pameran dan Sarana Promosi
IV.	KS	KERJA SAMA PENANAMAN MODAL					
1.	KS.01	Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah					
	01.01	Penyusunan Standarisasi Tata Kelola Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Direktorat Kerjasama Standarisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.02	Penyusunan Standarisasi Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Kerjasama Standarisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
2.	KS.02	Pembinaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah					
	02.01	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
	02.02	Pemantauan Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
	02.03	Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
3.	KS.03	Pemeringkatan/Kualifikasi Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal - Korespondensi - Peraturan Penetapan Pemeringkatan - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan hasil penilaian pemeringkatan kelembagaan	Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
4.	KS.04	Supervisi Peningkatan Kualifikasi PTSP - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
5.	KS.05	Kerja Sama Penanaman Modal Luar Negeri					
	05.01	Kerja Sama Bilateral Wilayah Amerika, Eropa dan Afrika - Korespondensi - Naskah Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri
	05.02	Kerja Sama Bilateral Wilayah Asia Pasifik dan Multilateral - Korespondensi - Naskah Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri
	05.03	Kerja Sama Multilateral - Korespondensi - Naskah Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri
	05.04	Kerja Sama Regional ASEAN dan ASEAN Negara Mitra - Korespondensi - Naskah Kerja Sama	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	05.04	Kerja Sama Subregional ASEAN dan Intra Kawasan - Bahan posisi runding - Hasil Pertemuan/ Kesepakatan perundingan/ Workshop	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri
6.	KS.06	Facilitasi Kerja Sama Dunia Usaha					
	06.01	Facilitasi Kerja Sama dengan Dunia Usaha Internasional - Korespondensi - MoU/Nota Kesepahaman	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri
	06.02	Facilitasi Penanam Modal Indonesia ke Luar Wilayah Indonesia (<i>Outward Investment</i>) - Data Penanam Modal Indonesia di Luar Wilayah Indonesia - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data kerja sama	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri
7.	KS.07	Pengelolaan Informasi Peluang Penanaman Modal - Data Peluang Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri
V.	LT	PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
1.	LT.01	Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha					
	01.01	Tata Kelola dan Integrasi Sistem - Korespondensi - Pedoman - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan sistem	Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.02	Pengembangan Aplikasi 1) Pengembangan Aplikasi dan Basis Data - Korespondensi - Pedoman - Laporan 2) Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan - Korespondensi - Pedoman - Laporan 3) Dukungan Teknis Sistem - Korespondensi - Pedoman - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan sistem	Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha
2.	LT.02 LT.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Pelayanan Berbantuan Perizinan Berusaha 1) Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha - Korespondensi - Pedoman - Laporan 2) Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha - Korespondensi - Pedoman - Laporan 3) Pemantauan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Korespondensi - Pedoman - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.02	Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha Primer dan Tersier - Korespondensi - Laporan - Izin Usaha	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha
	02.03	Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha Sekunder - Korespondensi - Laporan - Rekomendasi Visa dan Alih Status - Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) termasuk perubahan dan penutupan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha
	02.04	Pelayanan Operasional Perizinan Berusaha Prioritas - Korespondensi - Laporan - Perizinan Berusaha	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha
	02.05	Pelayanan Aplikasi Penanaman Modal - Korespondensi Permohonan Izin Prinsip - Keputusan Izin Prinsip	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha
	02.06	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal - Korespondensi Permohonan Izin Usaha - Keputusan Izin Usaha - Keputusan Angka Pengenal Importir - Keputusan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
3.	LT.03 03.01	Perdagangan Asing Pelayanan Fasilitas Berusaha Fasilitas Sektor Primer dan Tersier - Korespondensi - Keputusan Menteri Keuangan - Surat Rekomendasi - Surat Usulan Pemberian Fasilitas Perpajakan - Dokumen rapat koordinasi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha
		03.02					
4.	LT.04 04.01	Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Primer dan Tersier - Korespondensi - Laporan Pemantauan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha
		04.02					
	04.03	Klinik Investasi - Korespondensi - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
				INTERNAL	EKSTERNAL			
VI.	KL	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
1.	KL.01	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						
	01.01	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan - Data Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV	
	01.02	Konsolidasi Perkembangan Data Realisasi Penanaman Modal dengan Daerah - Korespondensi - Laporan - Data Konsolidasi Perkembangan Data Realisasi Penanaman Modal dengan Daerah	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Karena dapat mengganggu kinerja layanan	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV	
	01.03	Workshop Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online -Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV	
	01.04	Supervisi Implementasi LKPM Online -Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV	
	01.05	Publikasi Penyampaian LKPM - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV	
2.	KL.02	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.01	Bimbingan/Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
	02.02	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
	02.03	Fasilitasi Percepatan Realisasi Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
	02.04	Pengawasan Percepatan Realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
	02.05	Konsultasi Pelaksanaan Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
3.	KL03	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					
	03.01	Pengawasan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV
	03.02	Pengawasan Fasilitas Penanaman Modal - Korespondensi - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	03.03	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal - Korespondensi - SK Pencabutan/Pembatalan Izin Penanaman Modal	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Direktorat Wilayah I, II, III, dan IV

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
1.	1.	KEPEGAWAIAN					
	01.01	Formasi Pegawai Usulan dari Unit Kerja - Analisa jabatan - Analisa beban kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	01.02	Usulan Permintaan Formasi - Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	01.03	Persetujuan dan Penetapan Formasi - Surat persetujuan formasi dari Menpan - SK Penetapan formasi - SK Penetapan formasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	01.04	Penetapan Formasi Khusus - SK Penetapan formasi khusus	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
2.	2.	02.01					
	02.01	Pengadaan ASN PNS Proses Penerimaan Pegawai					Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		a. Korespondensi penerimaan pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	
		b. Keputusan kelulusan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan kebijakan pimpinan	
		c. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	
		d. Berkas lamaran yang tidak diterima - Surat lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu Kuning - Surat Keterangan dokter - dll (disesuaikan)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	
	02.02	Pengangkatan CPNS dan PNS - Nota usul dan kelengkapan penetapan NIP - Berkas lamaran - Nota usul dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun - SK CPNS/PNS Kolektif	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	02.03	Prajabatan - SK - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
3.	KP.03	Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		Kerja)/Pegawai Kontrak					
	03.01	Proses Penerimaan Pegawai - Pengumuman : seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, pelaksanaan ujian kesehatan, kemampuan bidang, keputusan hasil ujian, wawancara - Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	03.02	Pengangkatan ASN/P3K - Surat lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu Kuning - Surat Keterangan dokter dll (disesuaikan) - SK / Perjanjian Kerja	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
4.	KP.04	Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas					
	04.01	Proses Penerimaan Pegawai - Pengumuman : seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, pelaksanaan ujian kesehatan, kemampuan bidang, keputusan hasil ujian, wawancara, - SK Pengadaan Pegawai Honorer - SK Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	04.02	Pengangkatan Pegawai Honorer/ Harian Lepas - Surat lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu Kuning - Surat Keterangan dokter - dll (d disesuaikan) - SK / Perjanjian Kerja	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
5.	KP.05	Pembinaan/Pengembangan Karir Pegawai					
	05.01	Tugas Belajar/Izin Belajar/Diklat/Kursus/Ujian Dinas - Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut - Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi, - Laporan hasil tes masuk BKPM yang dituju - Surat ikatan kerja - Surat perjanjian izin/tugas belajar - Surat perintah/tugas belajar/sk/surat izin - Surat-surat sponsor - Laporan perkembangan studi - Laporan halangan/ketidakmampuan/rintang selama studi - Permohonan perpanjangan studi - Ijazah	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Akreditasi program studi - STTPL - Sertifikat					
	05.02	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	05.03	Penyusunan Pakta Integritas	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	05.04	Penetapan Angka Kredit (PAK) - DUPAK - PAK	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	05.05	Hukuman Disiplin - Surat Pemanggilan - Surat Peringatan - Berita Acara Pemeriksaan - Pernyataan Tidak Puas - Permohonan Banding - SK Ketetapan Banding	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	05.06	Penghargaan dan Tanda Jasa - Administrasi - SK - Sertifikat/ Piagam	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
6.	KP.06	Mutasi Pegawai					
	06.01	Alih Status - Surat Permohonan - Surat Alih Tugas/Perpindahan - Surat Keputusan - Surat Tugas - Nota persetujuan/pertimbangan BKN	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	06.02	Mutasi Keluarga - Surat Izin Pernikahan/Perceraian - Surat Penolakan Izin - Surat Nikah / Cerai - Akte Kelahiran Anak - Surat Keterangan Adopsi Anak - Surat Keterangan Meninggal dunia	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	06.03	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan - Nota Usul Kenaikan Pangkat/Golongan - SK Kenaikan Pangkat/golongan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	06.04	Kenaikan Gaji Berkala - Usulan - Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	06.05	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan - Usulan dan SK Kenaikan Jabatan - Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Usulan dan SK pemberhentian Jabatan					
	06.06	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai - Usulan - Nota persetujuan - Surat Persetujuan - SK	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	06.07	Peninjauan Masa Kerja - Usulan - Nota persetujuan - SK	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
	06.08	Penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Berkas BAPER-JAKAT - Administrasi - Notula	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
7.	KP.07	Administrasi Pegawai					
	07.01	Data/Keterangan Pegawai	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	07.02	Dokumentasi Identitas Pegawai - Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu - Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan - KP4 - Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	07.03	Pengurusan LHKPN - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	07.04	Daftar Urut Keangkatan (DUK)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja instansi	Biro Umum
8.	KP.08	Cuti Pegawai					
	08.01	Cuti Besar - Surat Permohonan Cuti - SK Cuti	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	08.02	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan - Surat Permohonan Cuti - SK Cuti	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	08.03	Cuti Alasan Penting - Surat Permohonan Cuti - SK Cuti	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	08.04	Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) - Surat Permohonan Cuti - SK Cuti	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
9.	KP.09	Kesejahteraan Pegawai					
	09.01	Layanan Kesehatan Pegawai - Rekam Medis - Kartu Anggota	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Rekam Medis - Surat Keterangan Sehat - Surat Keterangan Sakit		Internal			
	09.02	Asuransi Pegawai - Administrasi Pendaftaran - Penawaran asuransi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	09.03	Tabungan Perumahan - Administrasi Pendaftaran - Penawaran Perumahan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
	09.04	Bantuan Sosial - Tanda Terima - Ucapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	09.05	Rekreasi/Kesenian/Olahraga - Penetapan Anggaran - Administrasi - Laporan pertanggungjawaban Pemberhentian Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
10.	10.01	Pemberhentian Dengan Hormat a. Pemberhentian Tanpa Hak Pensiun/karena Pensiun - Permohonan Pemberhentian - Penetapan Pemberhentian pegawai - Usulan Penetapan Pensiun Pegawai - Usulan Penetapan Pensiun Janda/ Duda - Penetapan pemberhentian	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		pegawai b. Pemberhentian Karena Meninggal - Surat Kematian - Penetapan pemberhentian pegawai karena meninggal - Usul Penetapan Pensiun Janda/ Duda - Usulan Penetapan Pensiun Janda/ Duda - Penetapan pemberhentian pegawai					
	10.02	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat - Usulan Pemberhentian - Penetapan Pemberhentian	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
11.	KP.11	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa Kepegawaian - Pengaduan - Notula - Berita Acara Pemeriksaan - SK	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum
12.	KP.12	Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS - Berkas lamaran yang diterima - Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya - Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN - SK Pengangkatan CPNS	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi personal	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Hasil Pengujian Kesehatan					
		- SK Pengangkatan PNS					
		- SK Peninjauan Masa Kerja					
		- SK Kenaikan Pangkat					
		- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan					
		- Surat Pernyataan Pelantikan					
		- SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Pungsional					
		- SK Perpindahan Wilayah Kerja					
		- SK Perpindahan Antar Instansi					
		- SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)					
		- Berita Acara Pemeriksaan					
		- SK Hukuman					
		Jabatan/Hukuman Disiplin PNS					
		- SK Perbantuan/ Dipekerjakan di luar Instansi Induk					
		- SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan					
		- SK Pemberian Uang Tungu					
		- SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara					
		- SK Pengalihan PNS					
		- SK Pemberhentian sebagai PNS					
		- SK Pemberhentian Sementara					
		- Surat Keterangan Pernyataan Hilang					
		- Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- SK Penggantian Nama - Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran - Surat Nikah/Cerai - Akta Kelahiran - Isian Formulir PUPNS - Berita Acara Pengambilan Sumpah/Jarji PNS dan Jabatan - Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol - Surat Keterangan Mutasi Keluarga - Surat Keterangan Meninggal Dunia - Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan - Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional - Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus - Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala - Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri - Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri - Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS - Ijazah/Sertifikat - SK Penempatan/ Penarikan Pegawai - SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Surat Pertimbangan Status PNS - SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS					
		- Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena Dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah - SK Pensiun					
13.	KP.13	Berkas Perseorangan ASN P3K/ Honorir - Surat Lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu Kuning - Surat Keterangan Dokter - SK Pengangkatan, dll (d disesuaikan)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Mengungkapkan Rahasia/Data Pribadi	Biro Umum
14.	KP.14	Organisasi Non Kedinasan - AD/ART - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
II.	OT	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN					
1.	OT.01	Organisasi					
	01.01	Analisis Organisasi - Analisis organisasi - Struktur tugas dan fungsi organisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	01.02	Evaluasi Organisasi - Hasil evaluasi organisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
2.	OT.02	Tata Laksana					
	02.01	Penyusunan Sistem dan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		Prosedur Kerja - SOP/ Prosedur Tetap			Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	
	02.02	Pembakuan Sarana Kerja - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.03	Analisis Jabatan/Analisis Manajemen - Uraian jabatan - Analisis beban kerja - Peta jabatan - Evaluasi Jabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.04	Analisis Standar Kompetensi Jabatan - Analisis Standar Kompetensi Jabatan Struktural - Analisis Standar Kompetensi Jabatan Fungsional	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	0T.03	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
III.	HK	HUKUM					
1.	HK.01	Penyusunan Produk Hukum - Korespondensi - Draf Produk hukum - Notulensi - Produk Hukum BKPM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Bantuan Hukum
2.	HK.02	Penyusunan Naskah Kerja Sama Selain Penanaman Modal - Naskah kerja sama (kontrak, perjanjian, MoU, PKS)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi mitra kerja	Pusat Bantuan Hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
3.	HK.03	Ratifikasi Perjanjian Internasional - Korespondensi - Draf Produk hukum (hasil ratifikasi) - Notulensi - SK Tim	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan privasi mitra kerja	Pusat Bantuan Hukum
4.	HK.04	Dokumentasi Produk Hukum - Produk Hukum Internal dan Eksternal	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Bantuan Hukum
5.	HK.05	Sosialisasi / Penyuluhan dan Pembinaan Hukum - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Bantuan Hukum
6.	HK.06	Kasus atau Sengketa Hukum					
	06.01	Pidana - Surat Tugas - Korespondensi - Berita Acara Penyitaan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perkara	Pusat Bantuan Hukum
	06.02	Perdata - Surat kuasa - Berkas Panggilan Sidang, Gugatan, Jawaban, Putusan Sela, Replik, Duplik, Alat Bukti, Kesimpulan, Putusan - Berkas banding meliputi Panggilan Banding, Memori Banding, Putusan Banding - Berkas Kasasi meliputi Panggilan Kasasi, Memori Kasasi, Putusan Kasasi - Berkas Peninjauan Kembali meliputi Panggilan Peninjauan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perkara	Pusat Bantuan Hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		Kembali, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Peninjauan Kembali, Jawaban Peninjauan Kembali, Putusan Peninjauan Kembali					
	06.03	Tata Usaha Negara - Surat kuasa - Berkas Panggilan Sidang, Gugatan, Jawaban, Putusan Sela, Replik, Duplik, Alat Bukti, Kesimpulan, Putusan - Berkas banding meliputi Panggilan Banding, Memori Banding, Putusan Banding - Berkas Kasasi meliputi Panggilan Kasasi, Memori Kasasi, Putusan Kasasi - Berkas Peninjauan Kembali meliputi Panggilan Peninjauan Kembali, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Peninjauan Kembali, Jawaban Peninjauan Kembali, Putusan Peninjauan Kembali	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perkara	Pusat Bantuan Hukum
	06.04	Tata Negara - Surat kuasa - Jawaban - alat bukti	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perkara	Pusat Bantuan Hukum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	06.05	Arbitrase - Surat kuasa - Korespondensi - Notifikasi - Gugatan - Jawaban - Putusan sela - Transkrip hearing - Alat Bukti Tambahan - Transkrip saksi - Putusan Arbitrase - Upaya hukum	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait dengan kerahasiaan data perkara	Pusat Bantuan Hukum
7.	HK.07	Opini / Kajian / Telaah Hukum - Korespondensi - Hasil Telaah	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Bantuan Hukum
IV.	PR	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN					
1.	PR.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembangunan					
	01.01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang / Master Plan (RPJP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	01.02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
2.	PR.02	Rencana Kerja					
	02.01	Usulan Kegiatan Unit Kerja - Matriks usulan - Nota dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	02.02	Rencana Kerja BKPM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	-	Biro Perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
				Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Program dan Anggaran
	02.03	Rencana Kerja berdasar Pagu Indikatif - Matriks rencana kerja sesuai dengan pagu indikatif - Nota Dinas	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	02.04	Inisiatif Baru / New Inisiatif	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	02.05	Usulan Perubahan rencana kerja - Matriks Perubahan - Nota Dinas usulan perubahan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
3.	PR.03	Penetapan Kontrak Kinerja					
	03.01	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	03.02	Pimpinan Unit Kerja	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	03.03	Staf/Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
4.	PR.04	Perencanaan Anggaran					
	04.01	Penyusunan Rencana Anggaran	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	-	Biro Perencanaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		(RKAKL, DIPA, POK)			Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Program dan Anggaran
	04.02	Perencanaan PNB	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	04.03	Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	04.04	Standar Biaya Keluaran	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
5.	PR.05	Revisi Anggaran					
	05.01	Revisi DIPA dan POK	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	05.02	Anggaran Biaya Tambahan/ Penambahan Anggaran	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	05.03	APBN Perubahan	Biasa/Terbuka		Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
6.	PR.06	Pelaporan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	06.01	Laporan Berkala - Laporan Mingguan - Laporan Bulanan - Laporan Triwulan - Laporan Semesteran - Laporan Tahunan Unit Kerja - Laporan Tahunan - Laporan Tahunan Lembaga/Instansi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	06.02	Laporan Khusus	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	06.03	Laporan Perkembangan Tahapan Kegiatan/Progress Report	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
	06.04	LAKIP	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
V.	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT					
I.	HM.01	Keprotokolalan					
	01.01	Upacara - Laporan - Undangan - Daftar Hadir	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
	01.02	Kunjungan Kedinasan - Korespondensi - Bahan/Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.03	Agenda Kegiatan Pimpinan BKPM - Jadwal Kegiatan Pimpinan - Bahan/Laporan/Risalah	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
2.	HM.02	Dokumentasi/Liputan Kegiatan - Dokumentasi (kertas/foto/video/rekaman suara) - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
3.	HM.03	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan - Kliping koran - Brosur/Leaflet/Poster - Pengumuman/Pemberitaan - Bahan/Laporan Analisis Media	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
4.	HM.04	Hubungan antar Lembaga - Korespondensi - Press release - Transkrip - Bahan/laporan - Notulensi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
5.	HM.05	Penerbitan -Master Majalah -Master Buletin - Klipping - Master Jurnal	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
6.	HM.06	Publikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
7.	HM.07	Pemberian Penghargaan/ Tanda	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat	Publik,	-	Biro Peraturan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		Kenang-kenangan			Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Perundang- undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
8.	HM.08	Layanan Informasi Publik (PPID) - Korespondensi - Daftar Arsip/Informasi Publik - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Biro Peraturan Perundang- undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan	
VI.	KU	KEUANGAN					
1.	KU.01	Pelaksanaan Anggaran					
	01.01	Rencana Anggaran Biaya/RKA- KL	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Biro Umum	
	01.02	Penggajian - SK -	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Biro Umum	
	01.03	Pengeluaran Anggaran : Belanja Barang Habis Pakai, Belanja Barang Inventaris/Barang Modal, Belanja Jasa	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Biro Umum	
2.	KU.02	Pengelolaan Perbendaharaan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.01	Perbendaharaan - SK Pengangkatan KPA - SK Pengangkatan PPK - SK Pengangkatan Pejabat Penandatangan SPM - SK Pengangkatan Bendahara Pemerinta dan Bendahara Pengeluaran - SK Pengangkatan Staf Pengelola Anggaran (BPP, Staf KPA, Staf PPK) - SK Pengangkatan Pengelolaan SAI	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.02	Pajak - Surat Setoran Pajak - Faktur Pajak	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BIKPM	Biro Umum
	02.03	Penerimaan Negara Bukan Pajak - Bukti Setoran	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BIKPM	Biro Umum
	02.04	Pengembalian Belanja - Surat Setoran Pengembalian Belanja	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.05	Pemeriksaan Kas - Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BIKPM	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMAMAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.06	Pembukuan Anggaran - Buku Kas Umum - Buku Kas Pembantu - Kartu Pengawasan Kredit Anggaran - Rekening Koran Bank - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
3.	KU.03	Verifikasi Anggaran - Nota Hasil Verifikasi (Routing Slip)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
4.	KU.04	Akuntansi dan Pelaporan - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) - Laporan Keuangan Tahunan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
5.	KU.05	Ketatausahaan Keuangan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
	05.01	Keterangan Penghasilan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
	05.02	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	05.03	Permohonan Pinjaman	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
	05.04	Iuran Keanggotaan Organisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pegawai Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
6.	KU.06	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri - Permohonan Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>) - Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (<i>Grey book</i>) - Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , dan dokumen sejenisnya - Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : <i>draft agreement, legal opinion</i> , Surat menyurat dengan tender - Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, a.l. : usulan luncuran dana - Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN) - Otorisasi penarikan dana (<i>payment advice</i>) - Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		pendukung lainnya. - <i>Replenishment</i> (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain : <i>No Objection Letter (NOL)</i> , <i>Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)</i> , <i>Statement of Expenditure (SE)</i> - Laporan Bantuan/ Hibah - <i>Completion Report/Annual Report</i> - ketentuan/peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal					
7.	KU.07	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) a. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
		b. Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM), c. Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulan/Semester	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
			Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
VII.	PL	PERLENGKAPAN					
1.	PL.01	Perencanaan Pengadaan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	01.01	Analisa Kebutuhan - Daftar kebutuhan pengadaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	01.02	Pengaturan Tata Ruang - Layout	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	01.03	Penyusunan Daftar Rekanan Mampu - Daftar Rekanan Mampu	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
2.	PL.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa					
	02.01	Belanja Barang - Usulan pengadaan - Dokumen pengadaan - SPK/Kontrak - Laporan Serah Terima - Dokumen Pembayaran	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Biro Umum
	02.02	Belanja Jasa Konstruksi - Usulan pengadaan - Dokumen pengadaan - SPK/Kontrak - Laporan Serah Terima - Dokumen Pembayaran	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Biro Umum
	02.03	Belanja Jasa Konsultan - Usulan pengadaan - Dokumen pengadaan - SPK/Kontrak - Laporan Serah Terima - Dokumen Pembayaran	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum		Biro Umum
	02.04	Belanja Jasa Lainnya	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas		Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Usulan pengadaan - Dokumen pengadaan - SPK/Kontrak - Laporan Serah Terima - Dokumen Pembayaran Pengelolaan Barang		INTERNAL Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	EKSTERNAL Eksternal dan Penegak Hukum		
3.	PL.03 03.01	Penyimpanan/ Pergudangan - Laporan - Daftar Persediaan Barang	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
		Distribusi Barang - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
4.	PL.04	Pemeliharaan : Pertamanan/ landscaping, Perbaikan Gedung, Kebersihan Gedung dan Taman, Pengelolaan Jaringan Listrik dan Air - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
5.	PL.05	Pemanfaatan Aset - Kertas kerja penghitungan tarif - Perjanjian kerja sama	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait privasi data aset	Biro Umum
6.	PL.06 06.01	Pengelolaan Aset/BMN Izin Penggunaan Aset/ BMN - Korespondensi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait privasi data aset	Biro Umum
	06.02	Inventarisasi BMN - Daftar Inventarisasi BMN	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait privasi data aset	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	06.03	Penghapusan BMN - Korespondensi - Laporan - Berita Acara Penghapusan BMN	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait privasi data aset	Biro Umum
	06.04	Pelaporan BMN - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait privasi data aset	Biro Umum
	06.05	Pengelolaan Bukti Kepemilikan Aset - Surat Kepemilikan Aset	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat Eselon III yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Terkait privasi data aset	Biro Umum
VIII. RT		KERUMAHTANGGAAN					
1.	RT.01	Penyelenggaraan Perijalanan Dinas					
	01.01	Dalam Negeri - Surat Tugas - SPPD - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	01.02	Luar negeri - Undangan - Surat Tugas - Pengurusan Visa - Surat Setkab - Exit permit - SPPD - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
2.	RT.02	Pengelolaan Fasilitas Kantor					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.01	Kendaraan Dinas - Dokumen Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas - Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.02	Ruang Rapat dan konsumsi - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.03	Telekomunikasi - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
3.	RT.03	Keamanan dan ketertiban					
	03.01	Pengamanan - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
	03.02	Pengelolaan CCTV - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu fungsi dan tugas BKPM	Biro Umum
	03.03	Pengelolaan Parkir - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
IX. KA	KA	KEARSIPAN					
1.	KA.01	Pengurusan Surat Masuk dan Surat Keluar - Agenda surat - Ekspedisi surat/ pengendali	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
2.	KA.02 02.01	surat					
		Pemeliharaan Arsip					
		Pemberkasan	Terbatas	Eselon II dan Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Umum
		- Daftar Arsip Aktif					
	02.02	Penyimpanan	Terbatas	Eselon II dan Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Umum
		- Skema penyimpanan dan pengamanan					
		- Daftar Arsip Inaktif					
	02.03	Peminjaman dan Penggunaan Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
		- Korespondensi					
		- Buku peminjaman					
		- Laporan					
	02.04	Alih media arsip	Terbatas	Eselon II dan Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Umum
		- Berita Acara					
		- Daftar Arsip yang Dialihmediakan					
3.	KA.03	Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Terjaga	Terbatas	Eselon II dan Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Umum
		- Daftar Arsip Vital					
		- Daftar Arsip Terjaga					
		- Berita Acara Penyerahan Salinan Arsip Terjaga					
4.	KA.04 04.01	Penyusutan Arsip					
		Pemindahan Arsip Inaktif	Terbatas	Eselon II dan Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Umum
		- Daftar Arsip					
		- Berita Acara Pemindahan Arsip					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	04.02	Pemusnahan Arsip - Surat Usulan Pemusnahan - Rekomendasi/ Pertimbangan/Persetujuan Pemusnahan - Keputusan Pemusnahan - Berita Acara Pemusnahan - Daftar Arsip Musnah - SK Tim Pemusnahan - Notulensi	Terbatas	Eselon II dan Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Umum
	04.03	Penyerahan Arsip Statis - Surat Usulan Penyerahan - Rekomendasi/ Pertimbangan/Persetujuan Penyerahan - Berita Acara Penyerahan - Daftar Arsip Serah - Notulensi	Terbatas	Eselon II dan Pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Biro Umum
5.	KA.05	Pembuatan Sistem Kearsipan - Tata Naskah Dinas - Klasifikasi Arsip - Jadwal Retensi Arsip - Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dimamis - Dan lain-lain	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
6.	KA.06	Pembinaan Kearsipan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	06.01	Bimbingan Teknis Kearsipan/ Bimbingan Konsultasi Kearsipan - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	06.02	Supervisi/ Pengawasan Kearsipan - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	06.03	Monitoring - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
X.	PT	KEPUSTAKAAN					
1.	PT.01	Penyimpanan Bahan Pustaka - Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit - Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
2.	PT.02	Pengembangan Bahan Pustaka					
	02.01	Penyusunan Buku Induk Koleksi - Buku Induk Koleksi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.02	Penyusunan Daftar Buku Terseleksi - Daftar Buku	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.03	Penyusunan Daftar Buku dalam Pemesanan - Daftar Buku	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.04	Penyusunan Daftar Buku dalam Permintaan - Daftar Buku	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.05	Penyusunan Daftar Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah Deposit, dan Hibah - Daftar Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah Deposit, dan Hibah	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.06	Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus - Korespondensi - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	02.07	Penyusunan Daftar Tambahan Buku (<i>Accession List</i>) - Daftar Tambahan Buku	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
3.	PT.03	Pengembangan Bahan Pustaka					
	03.01	Penyusunan Data Katalog Koleksi - Daftar Katalog Koleksi Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	03.02	Penyusunan Daftar/Jajaran Kendali (Subyek dan Pengarang) - Daftar/Jajaran Kendali (Subyek dan Pengarang)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
4.	PT.04	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi					
	04.01	Penyusunan Data dan Statistik Anggota, Pengunjung dan Peminjaman Bahan Pustaka - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
	04.02	Pelayanan Pertanyaan Rujukan dan Jawaban - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
5.	PT.05	Preservasi Bahan Pustaka					
	05.01	Survei Kondisi Bahan Pustaka - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	05.02	Reprografi Bahan Pustaka - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Biro Umum
XI.	TI	TEKNOLOGI INFORMASI					
1.	TI.01	Penyusunan Rencana Strategis/ Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM) -Buku Rencana Strategis (Blue Print)	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
2.	TI.02	Penyusunan Rencana Pengembangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
3.	TI.03	Penyusunan Rancang bangun sistem/Design sistem Informasi dan Komunikasi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
4.	TI.04	Dokumentasi Arsitektur					
	04.01	Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	04.02	Sistem Aplikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	04.03	Infrastruktur dan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
5.	TI.05	Analisis Data	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi	Pengawas Eksternal dan	Memiliki dampak yang	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		EKSTERNAL	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	INTERNAL			
6.	TI.06	Pengelolaan Data Base	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Penanaman Modal	mengganggu kinerja BKPM	Penanaman Modal
7.	TI.07 07.01	Dokumentasi Implementasi Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pegawai Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	-	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	07.02	Sistem Aplikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pegawai Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	-	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	07.03	Infrastruktur dan sarana TIK	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
8.	TI.08	Perekaman dan Pemutakhiran Data - Formulir Isian - Daftar Tugas Perekaman - Jadwal Pelaksanaan - Laporan Hasil Perekaman dan Pemutakhiran Data	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
9.	TI.09	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data - Perencanaan Migrasi - Pelaksanaan Migrasi - Berita Acara Kegiatan Migrasi - Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi - Laporan hasil Migrasi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
10.	TI.10	Pemeliharaan Sistem Informasi -Laporan pemeliharaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
11.	TI.11	Evaluasi sistem dan media -Laporan evaluasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
12.	TI.12	Dokumen Hosting - Formulir permintaan hosting - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan hosting	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
13.	TI.13	Pengelolaan Data e-mail - Data e-mail	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
14.	TI.14	Keamanan Data Backup Data	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	14.01	Anti Virus	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	14.02	Firewall	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	14.03	Keanggotaan/Langgan/Jaringan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
15.	TI.15	Keanggotaan/Langgan/Jaringan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
XII.	DL	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1.	DL.01	Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan - Korespondensi - Kuesioner - Usulan Pedoman - Buku Panduan/ Buku Manual	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2.	DL.02	Penyusunan Program Diklat	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	02.01	Penyusunan Kurikulum dan Silabus					
	02.02	Penyusunan Jadwal	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	02.03	Penyusunan Modul/Materi/Bahan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	02.04	Penyusunan Panduan Fasilitator	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	02.05	Akreditasi Lembaga	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		- Surat Permohonan Akreditasi					
		- Laporan Hasil Verifikasi Lapangan					
		- Berita acara rapat tim penilai					
		- Surat Keputusan Penetapan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		Akreditasi - Sertifikasi Akreditasi - Laporan Akreditasi lembaga diklat					
	02.06	Sertifikasi sumberdaya manusia kediklatan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		- Surat Permohonan Sertifikasi - Laporan Hasil Verifikasi Lapangan - Berita acara rapat verifikasi - Berita acara rapat tim penilai/ asesor - Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi - Sertifikat dari Sertifikasi - Laporan Sertifikasi individual					
	02.07	Sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat - Korespondensi - Dokumen pendukung lainnya Penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
3.	DL.03 03.01	Diklat Struktural - Korespondensi - Dokumen pendukung lainnya	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	03.02	Diklat Fungsional - Korespondensi - Dokumen pendukung lainnya	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	03.03	Diklat Teknis dan Kemampuan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat	Pengawas	Memiliki dampak	Pusat Pendidikan dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
4	DL.04	Teknis Lainnya - Korespondensi - Dokumen pendukung lainnya Evaluasi Pasca Diklat - Korespondensi - Kuesioner - Laporan	Terbatas	eselon III yang diberi kewenangan) Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan)	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	yang mengganggu kinerja BKPM Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
XIII. PA	PA	PENGAWASAN					
1.	PA.01	Program Kerja Pengawasan Program Pembinaan/Fasilitasi Aparat Pengawasan Pendidikan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat
	01.01						
	01.02	Program Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan Regional	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat
	01.03	Program Pemantauan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat
	01.04	Program AKIP Unit Kerja di Lingkungan BKPM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat
	01.05	Program AKIP BKPM	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat
2.	PA.02	Pelaksanaan Pengawasan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	02.01	Pengawasan Internal - Administrasi pengawasan, antara lain: surat penugasan, surat pemberitahuan, kertas kerja pengawasan, pedoman pelaksanaan pengawasan dll - Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL) - Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) - Laporan hasil audit investigasi (LHA) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Eksternal Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
	02.02	Pengawasan Eksternal - Administrasi pengawasan, antara lain: surat penugasan, surat pemberitahuan, kertas kerja pengawasan, pedoman pelaksanaan pengawasan dll - Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		memerlukan tindak lanjut (TL) - Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) - Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut					
	02.03	Pengawasan Khusus - Korespondensi - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
	02.04	Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional - Laporan Hasil Pemeriksaan - Memorandum Hasil Pemeriksaan - Tindak Lanjut/ Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pegawai Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat
3.	PA.03	Pemantauan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
	03.01	Pemantauan Kegiatan - Korespondensi - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
	03.02	Pemantauan/penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi - Laporan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/ TP - Laporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pegawai Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
		- Laporan Kehilangan, Berita acara kehilangan barang/ uang, SK tanggungjawab Mutlak/ surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, SK Penghapusan uang dan barang, Laporan Penyelesaian TP/ TGR					
	03.03	PemantauanPenyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
	03.04	Penerapan Early Warning Sistem - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
	03.05	Pemantauan Disiplin Pegawai - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
4.	PA.04	Pengelolaan Gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS) - Laporan	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BKPM	Inspektorat
5.	PA.05	Pengaduan Masyarakat - Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat	Terbatas	Pejabat Eselon II (Pejabat eselon III yang diberi kewenangan), pengawas Internal	Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	Memiliki dampak yang mengganggu privasi dan kinerja BKPM	Inspektorat
6.	PA.06 06.01	Kegiatan Pengawasan Lainnya Sosialisasi Pengawasan - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES		DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				INTERNAL	EKSTERNAL		
	06.02	Bimbingan dan Konsultasi Pengawasan - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat
	06.03	Pemapanan Hasil Pengawasan - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat
	06.04	Keikutsertaan dalam Forum Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat
	06.05	Satuan Pengawasan Intern (SPI) / Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat
	06.06	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Eselon III (Pejabat Eselon IV yang diberi kewenangan), Pengawas Internal	Publik, Pengawas Eksternal dan Penegak Hukum	-	Inspektorat

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA